



Analisis Kinerja Keuangan pada Perwakilan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2025

Echa Aulia Putri^{1*}, Yohanes Joni Pambelum², Adila Durrotul Ghina³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email: echaauliaputriy@gmail.com¹, j_pambelum@akt.upr.ac.id², adila.durrotulghina@feb.upr.ac.id³

*Penulis Korespondensi: echaauliaputriy@gmail.com

Abstract. This study aims to examine whether there is an influence of auditor independence, due professional care, audit fees and audit tenure on audit quality. The population in this study were auditors who worked at KAP in East Jakarta. The number of samples in this study were 67 respondents. The sampling technique uses purposive sampling method. The research method used is quantitative with primary data sources. The method of data analysis uses multiple linear regression analysis with SPSS version 25. The results of this study provide empirical evidence that partially auditor independence variables, due professional care, audit fees and audit tenure in a positive direction have a significant effect on audit quality. Simultaneously the auditor independence variables, due professional care, audit fees and audit tenure with a positive direction have a significant effect on audit quality.

Keywords: Audit Engagement; Audit Fee; Audit Quality; Due Professional Care; Independent Auditor.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021–2025 menggunakan analisis rasio keuangan. Pendekatan kuantitatif deskriptif dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan BKKBN Kalimantan Tengah secara keseluruhan sehat dan baik. Rasio solvabilitas jangka pendek maupun jangka panjang berada pada kategori sangat baik hingga baik, meskipun mengalami penurunan pada 2024–2025. Rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi anggaran mendekati target. Namun, belanja masih didominasi operasional dibandingkan modal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BKKBN Kalimantan Tengah telah mengelola anggaran APBN secara akuntabel dan efisien, meskipun diperlukan peningkatan belanja modal dan pengelolaan likuiditas untuk mendukung program KB dan penurunan stunting ke depan.

Kata Kunci: Auditor Independen; Biaya Audit; Kecermatan Profesional; Kualitas Audit; Perikatan Audit.

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan disrupsi signifikan terhadap program pemerintah, termasuk layanan Keluarga Berencana (KB) yang menjadi tugas utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selama pandemi 2020–2022 Pandemi COVID-19 telah menyebabkan disrupsi signifikan terhadap program Keluarga Berencana di Indonesia. Memasuki era pemulihan tahun 2023–2026, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi tantangan ganda, yaitu memulihkan layanan Keluarga Berencana yang sempat terganggu sekaligus mendukung prioritas nasional penurunan stunting dan persiapan bonus demografi. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara keterbatasan fiskal pasca-pandemi dengan tuntutan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran yang semakin tinggi.

Pandemi COVID-19 telah mengganggu pelaksanaan program Keluarga Berencana secara nasional, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Selama periode 2020–2022, realokasi anggaran besar-besaran ke sektor kesehatan menyebabkan alokasi dana program KB di provinsi ini sangat terbatas, hanya mencapai sekitar Rp63 juta pada tahun 2020 (P2TP2A, 2021).

Akibatnya, pelayanan KB mengalami penurunan tajam secara nasional, dengan potensi peningkatan kelahiran yang tidak direncanakan (*baby boom*) sebesar 370.000–500.000 jiwa di awal 2021 (Komnas Perempuan, 2022). Program sosialisasi dan distribusi kontrasepsi terganggu karena bergantung pada pertemuan tatap muka, bakti sosial, dan kader lapangan. Di Kalimantan Tengah, fenomena ini semakin kompleks karena wilayah yang luas, akses transportasi sulit, dan tingginya kasus stunting yang kemudian menjadi prioritas nasional pasca-pandemi.

Pada periode pemulihan 2023–2026, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi beban tugas yang semakin berat. Program Keluarga Berencana harus dijalankan secara paralel dengan intervensi penurunan stunting, di mana BKKBN ditunjuk sebagai leading sector pada beberapa kegiatan. Namun, realisasi anggaran belanja terkait stunting di provinsi ini masih rendah, berkisar antara 13,4% hingga 20% pada periode April 2024 (KANWIL DJPb PROV.KALTENG, 2024).

Secara nasional, realisasi anggaran BKKBN per September 2025 baru mencapai 68,72% atau Rp2,65 triliun (Kasanjanu & Olavia, 2025). Situasi serupa terjadi di tingkat provinsi, di mana penyerapan anggaran Perwakilan BKKBN Kalteng belum menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal. Faktor eksternal seperti inflasi, perubahan kebijakan termasuk integrasi BKKBN ke Kementerian Dalam Negeri, serta dinamika APBN 2023–2026 semakin memperumit pengelolaan keuangan. Hal ini tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menunjukkan ketidakseimbangan antara alokasi dan capaian output program.

Fenomena tersebut semakin menonjol karena Kalimantan Tengah memiliki karakteristik demografi yang unik. Provinsi ini menjadi bagian penting dari upaya nasional mencapai bonus demografi 2030–2045. Namun, gangguan layanan KB selama pandemi telah meninggalkan dampak jangka panjang berupa peningkatan potensi beban demografi jika tidak segera diatasi melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik. Data LAKIP BKKBN Kalteng tahun 2023–2025 lebih banyak menyoroti capaian program daripada evaluasi mendalam terhadap efisiensi dan efektivitas keuangan.

Dengan demikian, penelitian ini dirancang untuk menganalisis dan mengukur kinerja keuangan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023–2026 sangat penting karena langsung berkaitan dengan pencapaian target pembangunan nasional jangka menengah dan panjang. Efisiensi anggaran KB dan intervensi stunting menjadi kunci keberhasilan bonus demografi 2030–2045 serta penurunan prevalensi stunting sesuai target nasional di bawah 14% pada 2024. Selain itu, penelitian ini memiliki nilai strategis bagi akuntabilitas dan tata kelola keuangan publik.

2. TINJAUAN LITERATUR

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan analisis yang dimanfaatkan untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan dan ketentuan yang berlaku secara benar dan tepat (Mendrofa et al., 2024a). Kinerja keuangan merupakan hasil yang dicapai dari serangkaian aktivitas pengelolaan yang dilakukan atas sumber keuangan yang dimiliki perusahaan (Oktaviani & Sugiarto, 2025). Kinerja keuangan dapat diukur melalui indikator seperti peningkatan pendapatan, laba, serta pertumbuhan aset. Peningkatan kapabilitas pengelolaan keuangan menjadi suatu hal yang krusial untuk memperbaiki kinerja keuangan suatu usaha (Nopiyana & Indiani, 2023). Sesuai peraturan mengenai periode anggaran negara, terdapat beberapa metrik kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur performa organisasi (Herawati et al., 2021). Kinerja keuangan didefinisikan sebagai gambaran hasil ekonomi yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu melalui pelaksanaan aktivitas usaha untuk memperoleh laba secara efisien dan efektif (Mendrofa et al., 2024b).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa kinerja keuangan adalah evaluasi capaian ekonomi perusahaan dalam periode tertentu melalui pengelolaan sumber daya keuangan secara efisien, efektif, dan sesuai prinsip yang benar, yang diukur melalui analisis laporan keuangan seperti peningkatan pendapatan, laba, aset, serta indikator utama seperti laba bersih dari laporan laba rugi. Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur melalui berbagai metode. Indikator umum yang dipakai mencakup pertumbuhan ekonomi, pendapatan pemerintah, belanja pemerintah, surplus atau defisit anggaran, serta tingkat utang pemerintah (Ramadana et al., 2023). Kinerja keuangan berfungsi sebagai tolak ukur subjektif untuk menilai efektivitas pemanfaatan aset dalam operasional organisasi guna meningkatkan hasil ekonomi secara optimal (Apriani et al., 2023).

Menurut Mardiasmo (2016:121) terdapat tiga tujuan utama pengukuran kinerja keuangan pada instansi pemerintah, yaitu: 1) Meningkatkan efektivitas layanan public melalui desain indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan program satuan kerja (satker), 2) Memfasilitasi distribusi anggaran dan pengambilan keputusan yang tepat

Laporan Keuangan Sektor Publik

Lembaga sektor publik adalah entitas yang berfokus pada penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan mandat konstitusi negara. Bentuknya secara umum meliputi lembaga negara, aparatur pemerintahan, dan organisasi yang terkait dengan keuangan negara. Akuntansi keuangan sektor publik berorientasi pada penyusunan laporan keuangan eksternal yang berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan, pertanggungjawaban publik, serta evaluasi kinerja manajemen dan organisasi (Siregar, 2025).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah dokumen terstruktur yang menggambarkan posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh instansi yang melaporkan. Bagian laporan keuangan sektor publik meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen utama dan paling fundamental dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah. Laporan ini menyajikan ringkasan sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan negara selama satu periode anggaran, dan sekaligus menampilkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang telah dilaksanakan. (KSAP, 2020) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan pada suatu entitas pelaporan, di mana setiap komponen tersebut jika dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

Dasar hukum Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, kewajiban penyusunan LRA juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ditinjau dari sisi basis akuntansi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menerapkan basis kas, di mana pendapatan diakui pada saat penerimaan kas dan belanja diakui pada saat pembayaran kas. Hal tersebut berbeda dengan laporan keuangan lainnya yang menggunakan basis akrual. Dengan demikian, hal ini semakin mempertegas pentingnya kepatuhan terhadap standar pelaporan yang ditetapkan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan data kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sesuai dengan KSAP (2020), SAL adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran berjalan dan tahun-tahun anggaran terdahulu beserta penyesuaian yang diizinkan. LPSAL berperan melengkapi LRA dalam rangkaian Laporan Pelaksanaan Anggaran berbasis kas, sehingga keduanya saling melengkapi untuk menyajikan posisi anggaran pemerintah secara utuh.

Menurut Send & Wibowo (2021) Dalam studinya tentang perkembangan penelitian akuntansi sektor pemerintah, penulis menekankan bahwa adopsi basis akrual sebagai pilar utama reformasi pelaporan keuangan pemerintah telah melahirkan komponen-komponen laporan baru, salah satunya adalah LPSAL. Hal ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam bagi aparaturnya keuangan pemerintah. Dengan demikian, LPSAL bukanlah laporan yang bersifat formalitas belaka, melainkan instrumen strategis untuk melacak posisi anggaran kumulatif pemerintah secara berkelanjutan dari periode ke periode.

Neraca

Berdasarkan KSAP (2020), neraca menunjukkan posisi keuangan entitas pelaporan melalui aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kewajiban penyusunan neraca telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (1), sedangkan standar teknisnya diatur dalam PSAP Nomor 01 dan serangkaian PSAP Aset (Nomor 05 hingga 09) dalam Lampiran PP No. 71 Tahun 2010.

Struktur neraca pemerintah terbagi menjadi tiga unsur esensial. Kelompok aset mencakup kas dan setara kas, investasi sementara, piutang, stok barang, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lain-lain. Kelompok kewajiban terdiri atas utang jangka pendek dan jangka panjang.

Ketiga, ekuitas yang merupakan kekayaan bersih pemerintah. Karina & Wibowo (2022) menegaskan bahwa analisis rasio berbasis neraca, seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio efisiensi aset, merupakan instrumen yang tepat sasaran untuk mengukur performa keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh dan komprehensif. Dengan demikian, neraca berfungsi ganda sebagai laporan posisi keuangan sekaligus alat analisis untuk keputusan strategis. Penelitian Prayogo *et al* (2023), menemukan bahwa pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa ketidaksesuaian antara penyajian neraca dengan persyaratan yang diatur PP No. 71 Tahun 2010, terutama pada pengungkapan informasi aset tetap dan piutang.

Laporan Operasional (LO)

LO disusun untuk melengkapi pelaporan keuangan pada siklus akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh (full accrual accounting cycle). Hal ini menyebabkan LO, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca memiliki keterkaitan yang integral dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan KSAP (2020), Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi lengkap tentang kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang direpresentasikan melalui pendapatan operasional, beban, dan surplus/defisit operasional. Laporan ini disajikan secara komparatif dengan periode tahun sebelumnya. LO setara dengan laporan laba/rugi dalam akuntansi komersial, namun diadaptasi untuk kepentingan sektor publik.

Menurut Irawan & Mariyani (2022) dalam studinya menyimpulkan bahwa penyusunan LO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Kepatuhan terhadap PSAP No. 12 ini merupakan indikator penting bahwa instansi tersebut telah menerapkan akuntansi berbasis akrual secara substantif, bukan hanya secara formal.

Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas pemerintah menampilkan informasi perolehan dan pengeluaran kas/setara kas, mutasi kas dalam satu periode akuntansi, serta neraca kas pada tanggal laporan.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) PP No. 8 Tahun 2006, LAK menyajikan perubahan kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, serta aktivitas transitoris dalam periode anggaran berjalan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Berdasarkan KSAP (2020), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi perubahan ekuitas pada entitas pelaporan yang mencerminkan kenaikan atau penurunan posisi keuangan sebagai akibat dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

Dalam konteks pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan LPE menuntut ketelitian dalam mengidentifikasi seluruh perubahan ekuitas, termasuk perubahan yang tidak berasal dari surplus/defisit-LO. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 menyatakan bahwa penyajian LPE digunakan untuk menyajikan perubahan ekuitas yang mencakup surplus/defisit LO, koreksi ekuitas, dan transaksi antar entitas, sehingga terwujud keseimbangan yang dapat diverifikasi antara neraca awal dan neraca akhir periode (LKPP, 2023).

Keseimbangan ini adalah salah satu indikator utama kualitas laporan keuangan yang menjadi fokus pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama proses audit atas laporan keuangan pemerintah.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari laporan keuangan. CaLK berperan memberikan penjelasan mendetail atas pos-pos laporan keuangan sehingga pengguna dapat memahami informasi yang terkandung di dalamnya dengan lebih baik. CaLK berisi penjelasan, analisis, dan uraian atas nilai-nilai yang disajikan dalam laporan keuangan guna memenuhi prinsip pengungkapan yang memadai (A. Sari & Kusmilawaty, 2023).

Rasio Keuangan

Menurut PP Nomor 8 Tahun 2006, kinerja keuangan pemerintah mencerminkan derajat keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan serta target pembangunan nasional. Aspek ini mencakup pengelolaan anggaran, pelaksanaan program/kegiatan, dan realisasi hasil yang diinginkan dengan optimalisasi sumber daya yang ada. Pelaporan tersebut disusun dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Wawolangi *et al.*, 2025).

Dalam studi ini, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa rasio keuangan sebagai alat ukur, di antaranya:

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menggambarkan tingkat kemampuan organisasi dalam memenuhi seluruh kewajiban utangnya jika dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Rasio ini dapat dimaknai sebagai perlunya ketersediaan kapasitas fiskal yang memadai untuk menanggung risiko pembiayaan, tetap terjaganya kendali pemerintah atas arah kebijakan dan pelaksanaan program meskipun menggunakan utang, serta adanya manfaat yang lebih besar dari dana pinjaman dibandingkan biaya bunga yang harus dibayar, sehingga pada akhirnya memberikan keuntungan bagi masyarakat melalui peningkatan layanan dan pembangunan (Munthe *et al.*, 2025). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio leverage, yang berfungsi untuk mengukur kemampuan aktiva dalam memenuhi kewajiban organisasi (Keumala *et al.*, 2023).

Rasio Efektivitas

Dalam konteks sektor publik, efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu aktivitas berhasil menciptakan dampak signifikan dalam memenuhi layanan publik sesuai dengan indikator target yang telah dibuat sebelumnya (I. Sari *et al.*, 2021).

Efektivitas merupakan ukuran pencapaian tujuan organisasi yang telah dirumuskan. Efektivitas dapat dihitung sebagai perbandingan antara *outcome* dan *output* (Siswanto & Maylani, 2022). Semakin tinggi nilai rasio atau realisasi target yang dicapai, semakin menunjukkan efektivitas kinerja anggaran pada instansi pemerintahan, dan sebaliknya (I. Sari et al., 2021)

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi mengukur proporsi pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan pendapatan riil yang diperoleh (Perangin-Angin et al., 2023). Pemerintah dianggap efisien jika rasio tersebut berada di bawah 100%, dengan nilai yang semakin rendah menandakan tingkat efisiensi keuangan yang lebih baik (Awani & Hariani, 2021).

Rasio Aktivitas/ Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja menggambarkan cara pemerintah daerah mengalokasikan dana secara optimal antara belanja operasi dan belanja modal (Wulandari et al., 2023). Rasio Keserasian Belanja/Aktivitas menggambarkan prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana secara maksimal untuk belanja teratur dan belanja pembangunan. Dua perhitungan utama dalam rasio ini adalah Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal (Oktaviani & Sugiarto, 2025). Salah satu indikator untuk mengukur rasio solvabilitas adalah Total Asset Turnover (TATO), yaitu perbandingan antara seluruh pendapatan rumah sakit dalam tahun berjalan dengan total aset yang dimiliki rumah sakit (Keumala et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif, menggunakan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2023-2026. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran objektif hubungan antar pos laporan keuangan sesuai PSAP No. 03 dan PP No. 8 Tahun 2006. Data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif numerik, meliputi angka pendapatan, belanja, aset, liabilitas, serta arus kas dari laporan keuangan. Data kualitatif pendukung berasal dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk menjelaskan klasifikasi arus kas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Sumber data primer diambil dari Laporan Keuangan Tahunan (LKJIP), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah periode 2023-2026.

Analisis dilakukan melalui perhitungan rasio keuangan pemerintah seperti rasio solvabilitas, rasio efektivitas belanja, rasio efisiensi, rasio aktivitas/ keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan. Teknik tambahan meliputi analisis tren time series 2023-2026 dan triangulasi dengan CaLK untuk menginterpretasikan faktor ekonomi regional Kalimantan Tengah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam pada dasarnya tidak hanya membahas bagaimana memperoleh keuntungan, tetapi juga bagaimana aktivitas ekonomi dijalankan dengan nilai dan tanggung jawab. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang sering menekankan efisiensi dan pertumbuhan, ekonomi Islam mencoba menempatkan aspek moral sebagai bagian penting dalam setiap kegiatan ekonomi. Tujuannya bukan sekadar pertumbuhan, tetapi kesejahteraan yang lebih luas (falah), yang mencakup keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam pandangan M. Umer Chapra, sistem ekonomi yang tidak didukung oleh nilai moral cenderung menghasilkan ketimpangan dan krisis yang berulang (Chapra, 2000). Dari sini bisa dipahami bahwa ekonomi Islam hadir bukan hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai upaya memperbaiki arah sistem ekonomi itu sendiri.

Dalam konteks tersebut, hadis Nabi Muhammad SAW menjadi rujukan penting karena memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana prinsip ekonomi dijalankan. Hadis tidak hanya menjelaskan aturan, tetapi juga menunjukkan praktik yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak aspek ekonomi yang dibahas dalam hadis, mulai dari jual beli, larangan riba, etika bisnis, hingga distribusi kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam sudah memiliki perhatian terhadap bagaimana aktivitas ekonomi seharusnya berlangsung secara adil dan manusiawi. Selain itu, Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah, sehingga nilai-nilai yang diajarkan tidak berhenti pada konsep, tetapi juga terlihat dalam praktik nyata.

Salah satu hal yang cukup menonjol dalam hadis adalah larangan riba. Riba dipahami sebagai praktik yang mengandung ketidakadilan karena memberikan keuntungan tanpa adanya risiko yang seimbang. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, praktik bunga dalam sistem perbankan sering dianggap memiliki kemiripan dengan riba, terutama karena adanya ketimpangan antara pihak yang memberi dan menerima pinjaman. Dalam banyak kasus, pihak yang lemah justru menanggung beban yang lebih besar.

Dari sudut pandang ini, larangan riba dalam hadis menjadi relevan untuk dikaji kembali, bukan hanya sebagai aturan agama, tetapi juga sebagai kritik terhadap sistem keuangan modern. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil yang lebih menekankan pada keadilan dan pembagian risiko.

Selain itu, hadis juga memberi perhatian besar pada sikap jujur dan amanah dalam berbisnis. Kejujuran bukan hanya soal moral pribadi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepercayaan dalam sistem ekonomi. Dalam praktik ekonomi modern, banyak masalah muncul karena hilangnya kepercayaan, seperti manipulasi data, penipuan, atau praktik bisnis yang tidak transparan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak selalu bersifat teknis, tetapi juga menyangkut perilaku manusia. Dalam hal ini, hadis memberikan penekanan bahwa aktivitas ekonomi seharusnya dijalankan dengan integritas. Jika nilai ini benar-benar diterapkan, maka banyak masalah dalam dunia bisnis sebenarnya bisa diminimalkan.

Hadis juga menyinggung soal praktik monopoli atau penimbunan barang (ihtikar). Dalam praktiknya, penimbunan dilakukan untuk menciptakan kelangkaan sehingga harga bisa dinaikkan. Dalam ekonomi modern, fenomena seperti ini masih sering terjadi, meskipun dalam bentuk yang lebih kompleks, seperti dominasi pasar oleh perusahaan besar. Dampaknya tetap sama, yaitu merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar. Larangan dalam hadis menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan praktik yang merugikan banyak pihak demi keuntungan segelintir orang. Ini sekaligus menegaskan bahwa pasar yang sehat tidak hanya ditentukan oleh mekanisme ekonomi, tetapi juga oleh nilai keadilan.

Di sisi lain, hadis juga memberikan perhatian pada distribusi kekayaan. Islam tidak melihat kekayaan sebagai sesuatu yang hanya dikumpulkan, tetapi juga harus didistribusikan. Melalui zakat, infak, dan sedekah, Islam mencoba memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kelompok tertentu saja. Dalam kondisi sekarang, ketimpangan ekonomi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, di mana sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan distribusi yang adil. Dalam hal ini, konsep distribusi dalam hadis menawarkan pendekatan yang lebih seimbang karena menekankan tanggung jawab sosial.

Jika dilihat secara keseluruhan, prinsip-prinsip ekonomi dalam hadis sebenarnya masih sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Larangan riba bisa dikaitkan dengan kritik terhadap sistem keuangan, kejujuran bisa menjawab krisis etika bisnis, larangan monopoli bisa mendukung pasar yang lebih adil, dan distribusi kekayaan bisa mengurangi kesenjangan sosial. Artinya, hadis tidak hanya berbicara dalam konteks masa lalu, tetapi juga bisa menjadi acuan dalam menghadapi persoalan ekonomi modern.

Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut tentu tidak sederhana. Sistem ekonomi global saat ini masih didominasi oleh kapitalisme yang memiliki pendekatan berbeda, terutama dalam hal kebebasan pasar. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam juga masih terbatas. Banyak yang mengenal istilahnya, tetapi belum memahami bagaimana penerapannya secara nyata. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam sistem ekonomi modern.

Meski demikian, perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang cukup positif. Lembaga keuangan berbasis syariah mulai berkembang dan semakin dikenal, bahkan di luar negara Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam memiliki daya tarik yang lebih luas. Dalam situasi di mana sistem ekonomi sering mengalami krisis, wajar jika mulai muncul pencarian terhadap alternatif yang lebih stabil dan adil, dan ekonomi Islam menjadi salah satu yang mulai dilirik. Dalam konteks ini, hadis tetap memiliki posisi penting, bukan hanya sebagai sumber ajaran, tetapi juga sebagai panduan dalam membentuk perilaku ekonomi. Hadis membantu mengingatkan bahwa aktivitas ekonomi tidak bisa dilepaskan dari nilai dan tanggung jawab. Karena itu, upaya untuk mengaitkan nilai-nilai dalam hadis dengan praktik ekonomi saat ini menjadi hal yang penting, agar sistem ekonomi tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memiliki arah yang lebih manusiawi.

Pada akhirnya, kajian terhadap hadis dalam konteks ekonomi kontemporer tidak hanya berhenti pada pemahaman teori, tetapi juga diarahkan pada pencarian solusi. Yang menjadi tantangan bukan lagi apakah nilai-nilai tersebut relevan, tetapi bagaimana cara menerapkannya secara nyata. Jika nilai spiritual dan praktik ekonomi bisa berjalan bersama, maka peluang untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata akan semakin terbuka.

5. KESIMPULAN

Analisis rasio keuangan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021–2025 menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan instansi berada dalam kondisi sehat dan baik. Solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang berada pada kategori sangat baik hingga baik, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2024 dan 2025 yang mengindikasikan perlunya pengelolaan likuiditas yang lebih hati-hati. Rasio efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran menunjukkan hasil yang sangat baik sepanjang periode penelitian. Realisasi belanja yang mendekati target anggaran (rasio mendekati 1) mencerminkan pengelolaan anggaran APBN yang efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan program keluarga berencana, pengendalian penduduk, serta penurunan stunting.

Dari sisi keserasian belanja, instansi masih didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal. Hal ini sesuai dengan karakteristik tugas pokok BKKBN yang berfokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat, namun di sisi lain menunjukkan perlunya peningkatan alokasi belanja modal untuk memperkuat sarana dan prasarana pendukung program.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah mampu mengelola anggaran negara dengan akuntabel dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, untuk menjaga keberlanjutan kinerja keuangan di masa mendatang, diperlukan upaya penguatan pengelolaan aset, optimalisasi belanja modal, serta pengendalian kewajiban jangka pendek yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, M., Lestari, N. E. P., & Hidayat, A. (2023). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi. *Jurnal Pariwisata Bisnis Digital Dan Manajemen*, 2(2), 82–89. <https://doi.org/10.33480/jasdim.v2i2.4628>
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48.
- Herawati, Syamsurijal Tan, Sri Rahayu, & Syahmardi Yacob. (2021). The Effect Of Financial And Non-Financial Performance On Regional Competitiveness Of Bungo District With Capital Expenditure And Budget Governance As Intervening. *International Journal of Social Science*, 1(4), 347–354. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i4.713>
- Irawan, D., & Mariyani. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (Vol. 01, Nomor 1).
- KANWIL DJPb PROV.KALTENG. (2024, June). *Kinerja Perekonomian dan Fiskal Regional Kalimantan Tengah per 31 Mei 2024*. KEMENKUE RI. <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/kalteng/id/data-publikasi/publikasi/siaran-pers.html?start=18>
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi COVID-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(2), 146–166. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>
- Kasanjanu, B., & Olavia, L. (2025, September 15). *Realisasi Anggaran BKKBN Rp 2,65 Triliun, 68,72% dari Total Pagu 2025*. Investortrust. <https://investortrust.id/national/78991/realisasi-anggaran-bkkbn-rp-2-65-triliun-68-72-dari-total-pagu-2025>

- Keumala, C. M., Maryana, Husin, dasmi, Al-Fahmi, M. L., Shalawati, Tamara, S. U., & Zahara, I. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10, 580–600.
- Komnas Perempuan. (2022). *Melihat Dampak Pandemi COVID-19 dan Kebijakan PSBB melalui Kacamata Perempuan Indonesia*.
- KSAP. (2020). *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- LKPP. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023*.
- Mendrofa, R., Wahyuni, A., Isnaini, P., & Aliah, N. (2024a). Menilai Kinerja Keuangan Dengan Analisis Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 35–43. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art4>
- Mendrofa, R., Wahyuni, A., Isnaini, P., & Aliah, N. (2024b). Menilai Kinerja Keuangan Dengan Analisis Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 35–43. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art4>
- Munthe, R. N. B., Mailani, A., Novisa, A., Riadhi, A. A., Maisaroh, F., & Dewi, N. C. (2025). Analisis Rasio Solvabilitas Pada Emiten Sektor Healthcare Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2021–2024. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 7242–7248. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4833>
- Ningrum, K. A. (2022). Financial Performance in National Population and Family Planning Board West Java Province for. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02(03), 554–561.
- Ningrum, K. A., & Arief, K. (2022). Financial Performance in National Population and Family Planning Board West Java Province for. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02(03), 554–561.
- Nopiyana, P. E., & Indiani, P. R. (2023). *Pengaruh Sikap Keuangan, Perilaku Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Pada PEMDES AMBENGAN*. 6.
- Oktaviani, D. S., & Sugiarto, S. (2025). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3337–3348. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1026>
- P2TP2A. (2021). *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*.
- Perangin-Angin, P. G. B., Natalian, E. A., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 173–183.
- Permadi Syukur, D., Majid, J., Suhartono, dan, Aditiya, R., Akuntansi, J., & Islam Negeri Alauddin Makassar, U. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Barometer Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2.
- Prayogo, Y., Fikri, A. S., Nandini, K. P., Syariah, E., Thaha, S., & Jambi, S. (2023). *Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah*. 3(2), 44–58. <http://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamikapage44>
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>

- Ritonga, I. T. (2017). *Analisa Laporan Keuangan PEMDA*. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Sari, A., & Kusmilawaty, K. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Untuk Mewujudkan Laporan Keuangan Yang Berkualitas (Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards to Realize Quality Financial Reports). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 30(1). <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1185>
- Sari, I., Asaari, M., Sefty, I., & Hidayah, N. (2021). Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Paper*.
- Send, Z. V., & Wibowo, P. (2021). Perkembangan Penelitian Akuntansi Pemerintah Pada Dua Jurnal Nasional Terakreditasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Siregar, O. K. (2025). *Akuntansi Sektor Publik* (V. Arnita, Ed.). Eurika Media Aksara.
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Wawolangi, S. G. V., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2025). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2023. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 17–30. <https://doi.org/10.58784/rapi.270>
- Wulandari, R., Anggun, B., Lestari, H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Risma*, 3.